

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan upah minimum telah menjadi isu yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa Negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Tujuan dan manfaat kebijakan upah minimum diterapkan atau dibuat adalah untuk menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, meningkatkan produktivitas pekerja, mengembangkan dan meningkatkan kualitas perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien.¹

Salah satu kelemahan Negara-negara berkembang dalam penyelenggaraan pembangunan adalah pada sumber daya

¹ Amirul Zamharir, “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Perkapita, dan Upah Minimum Terhadap Human Development Index: Studi Kasus 12 Provinsi Dengan Kategori Lower Medium Di Indonesia*”, (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, 2016), 83.

manusia. Karena itu menjadi tugas manajemen pembangunan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam proses pembangunan, karena selain sebagai pelaku pembangunan, juga sekaligus menjadi sasaran pembangunan.²

Di era globalisasi dimana tingkat persaingan sangat kompetitif dalam tataran produk dan jasa maka faktor tenaga kerja terutama upah menjadi penting. Kualitas tenaga kerja yang tercermin dalam bentuk upah yang tinggi menjadi suatu keharusan. Hal ini tercermin dalam upaya dan kebijakan ketenagakerjaan yang telah dilaksanakan dan dicapai selama ini. Proses ini terus berjalan dengan segala upaya perbaikan, tetapi yang penting untuk dipahami bersama adalah bahwa tingginya upah sangat tergantung pada proses pendidikan dan pelatihan pekerja dalam bekerja.³

² Rakhmat, *Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 40.

³ Fransiscus GO dan Hani Subagio, *Mengakhiri Era Tenaga Kerja Murah* (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2014), 10.

Peningkatan upah minimum akan meningkatkan kebutuhan hidup layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan yang akan berpengaruh terhadap kepada kesejahteraan masyarakat. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga. Akibat peningkatan upah minimum yang diterima, daya beli masyarakat mengalami peningkatan sehingga berdampak positif pada *human development index*.⁴

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah angkatan kerja menurut Kabupaten/Kota di provinsi Banten tahun 2012-2015 mengalami fluktuasi jumlah angkatan kerja, namun di sisi lain, jika dihubungkan dengan indeks pembangunan manusia, maka jumlah angkatan kerja yang mengalami fluktuasi tidak berpengaruh dominan terhadap indeks pembangunan manusia. Ini diperkuat juga oleh tidak termasuknya jumlah angkatan kerja

⁴ Amirul Zamharir, “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Perkapita, dan Upah Minimum Terhadap Human Development Index: Studi Kasus 12 Provinsi Dengan Kategori Lower Medium Di Indonesia*”, (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, 2016), 83.

ke dalam 3 parameter atau ukuran *Human Development Index* (HDI) diantaranya yaitu, kesehatan (sebagai ukuran *longevity*), pendidikan (sebagai ukuran *knowledge*), dan tingkat pendapatan riil (sebagai ukuran *living standards*).⁵ Sedangkan upah minimum masuk ke dalam ukuran HDI sebagai tingkat pendapatan riil.

Data jumlah angkatan kerja yang terdiri dari 8 Kabupaten/Kota, hanya kabupaten tangerang dan kota serang yang tidak mengalami kenaikan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya, sedangkan kabupaten pandeglang, kabupaten lebak, kabupaten serang, kota cilegon, kota tangerang dan kota tangerang selatan yang mengalami fluktuasi jumlah angkatan kerja. Di samping itu, data indeks pembangunan manusia menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Berikut salah satu tabel data tahunan jumlah angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia kota cilegon tahun 2012-2015:

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten 2017* (Banten: Badan Pusat Statistika Provinsi Banten, 2015), 8.

Tabel 1.1
Data Angkatan Kerja Kota Cilegon 2012-2015

Tahun	Kota/ Kabupaten	Angkatan Kerja	Indeks Pembangunan Manusia (%)
2012- 2015	Kota Cilegon	180030	70.07
	Kota Cilegon	170476	70.99
	Kota Cilegon	185307	71.57
	Kota Cilegon	186664	71.81

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Banten

Dari segi kualitas pendidikan, rata rata lama orang Indonesia menempuh pendidikan yaitu 12,7 tahun atau sampai sekolah menengah atas, jika diasumsikan dengan sistem pendidikan wajib belajar, rata-rata orang Indonesia menempuh pendidikan SD-SMA, setelah itu penduduk Indonesia memilih untuk bekerja, sedangkan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan hanya 3,7% dari dana anggaran Indonesia. Di samping itu, Sumber Daya Manusia sangat dipengaruhi oleh peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan, namun realitanya menunjukkan bahwa masih banyak terjadi ketimpangan social yang cukup besar antara masyarakat kaya dan masyarakat berpenghasilan dibawah rata-rata. Ditambah rendahnya tingkat

pendidikan angkatan kerja juga telah mengakibatkan rendahnya partisipasi penduduk dalam kegiatan pembangunan, hal ini mengingat banyak di antara mereka yang tidak dapat memasuki pasaran kerja terutama yang memerlukan keterampilan khusus.⁶

Maka dari itu, pembangunan manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki produktifitas tinggi sehingga mampu meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi dan secara agregat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia merupakan kontributor dari stabilnya proses pertumbuhan ekonomi dan tidak hanya berkontribusi terhadap tujuan fundamental pembangunan, tetapi juga sebagai faktor penting terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu.⁷

Secara umum kecenderungan masalah ketenagakerjaan di Indonesia terkait dengan keterbatasan daya serap perekonomian dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang terus

⁶ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 172-174.

⁷ Didin S Damanhuri dan Muhammad Findi, *Masalah Dan Kebijakan: Pembangunan Ekonomi Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2014), 130.

mengalami peningkatan. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa pendayagunaan dan pembinaan yang masih belum optimasi. Kurangnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat yang sudah siap kerja menghadapi beberapa alternatif pilihan, tenaga kerja tetap bekerja walaupun dengan upah yang sangat jauh dari standar upah minimum regional yang telah ditentukan oleh pemerintah di masing-masing wilayah, pekerja bekerja tidak penuh atau pekerja bekerja setidaknya kurang dari 35 jam setiap minggunya. Konsekuensinya, jumlah pengangguran meningkat dan pendapatan yang diterima pekerja lebih rendah dari upah minimum.⁸

Melimpahnya sumber daya manusia yang berhadapan dengan sumber daya produktif lainnya membuat upah berada pada tingkat yang sangat rendah, kelangkaan sumber-sumber produktif lainnya itu tidak memungkinkan disediakannya pekerjaan yang cukup banyak untuk semua orang yang mau bekerja, bahkan untuk upah rendah sekalipun. Selain itu ada

⁸ Nazaruddin Malik, *Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia*, 9.

sejumlah besar sumber daya manusia yang merasa tidak ada gunanya untuk menawarkan diri dengan upah rendah ini.⁹

Adanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu proses untuk memperbesar pilihan yang ada bagi manusia. Ada tiga parameter yang terdapat pada indeks pembangunan manusia yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan. Penduduk Indonesia kualitasnya saat ini masih sangat memprihatinkan. Berdasarkan penilaian UNDP, pada tahun 2007 kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) Indonesia mempunyai *ranking* yang sangat memprihatinkan, yaitu 110 dari 177 negara di dunia. Dalam kaitan ini program kependudukan dan keluarga berencana merupakan salah satu program investasi pembangunan jangka panjang yang mesti dilakukan sebagai landasan membangun sumber daya manusia yang kokoh di masa mendatang.¹⁰

⁹ M.Fahim Khan dan Suherman Rosyidi, *Esai-Esai Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 228.

¹⁰ Soeharsono Sagir dkk, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 258.

Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis memilih judul:
“PENGARUH UPAH MINIMUM DAN JUMLAH
ANGKATAN KERJA TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI BANTEN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Upah minimum yang mengalami kenaikan bisa berpengaruh besar terhadap kenaikan indeks pembangunan manusia. Namun jika upah minimum mengalami penurunan, maka kemungkinan besar pula indeks pembangunan manusia mengalami penurunan atau tetap persentasenya. Karena upah minimum termasuk dalam salah satu ukuran *Human Development Index*.
2. Jumlah angkatan kerja yang fluktuatif di setiap kabupaten atau kota masih dipengaruhi sumber daya manusia, dari segi keterampilan, keahlian dan pelatihan kerja. Sehingga

masih ada kemungkinan jumlah angkatan kerja bisa mempengaruhi persentase indeks pembangunan manusia.

3. Apabila upah minimum sudah layak dan jumlah angkatan kerja meningkat, akan membantu meningkatkan persentase indeks pembangunan manusia.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan ruang lingkup masalah diterapkan agar dalam penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian tidak menyimpang dari sasarannya.

Hal-hal penting dalam penelitian yang perlu dibatasi adalah:

1. Penelitian fokus pada variabel-variabel yang dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten tahun 2012-2015.
2. Penelitian fokus kepada Pengaruh Upah Minimum dan Jumlah Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten tahun 2012-2015.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang sangat penting karena langkah ini akan menentukan kemana suatu penelitian akan diarahkan. Perumusan masalah pada dasarnya adalah merumuskan pertanyaan yang jawabannya akan dicari melalui penelitian berdasarkan seputar keadaan Pengaruh Upah Minimum dan Jumlah Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia?
2. Bagaimana pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap indeks pembangunan manusia?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum dan jumlah angkatan kerja terhadap indeks pembangunan manusia?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia.\
2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap indeks pembangunan manusia.
3. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum dan jumlah angkatan kerja terhadap indeks pembangunan manusia.

F. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan baru didalamnya.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru tentang pengaruh upah minimum dan jumlah angkatan kerja terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Banten. sehingga jika kemudian akan dilakukan penelitian

yang sama dapat mengacu kepada hasil penelitian yang telah dilakukan.

2. Bagi Lembaga Terkait

Hasil penelitian ini juga memberikan manfaat bagi Badan Pusat Statistik Provinsi Banten untuk menjadi bahan evaluasi ke depan.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat di jadikan referensi bagi peneliti yang lain sehingga peneliti selanjutnya bisa mendapatkan tambahan informasi untuk memperluas pembahasan sehingga dari hal tersebut di harapkan dapat menjadi lebih baik lagi.

G. Kerangka Pemikiran

Salah satu titik perhatian dalam konsep perencanaan tenaga kerja adalah menyangkut penyediaan tenaga kerja (angkatan kerja). Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang telah masuk pasar kerja dan telah siap menawarkan jasanya dalam melaksanakan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan. Angkatan kerja yang telah berada di pasar kerja, untuk dapat

terserap pada suatu lapangan kerja atau kegiatan ekonomi adalah angkatan kerja yang mempunyai kualitas sesuai dengan tuntutan kompetensi yang di persyaratkan pada suatu lapangan pekerjaan.¹¹

Di NSB, tingkat produktivitas tenaga kerjanya (output per pekerja) sangat rendah di bandingkan dengan Negara-negara maju. Hal ini bisa di jelaskan dengan menggunakan beberapa konsep ekonomi. Salah satunya adalah prinsip produktifitas marginal yang semakin menurun (*diminishing marginal productivity*). Prinsip ini menyatakan bahwa jika ada penambahan kuantitas pada salah satu input variabel (misalnya, tenaga kerja), sedangkan kuantitas input-input lainnya (modal, tanah, dll) di ansumsikan tetap, maka pada suatu titik tertentu produk marginal yang di hasilkan dari adanya tambahan input variabel tersebut akan menurun. Oleh karena itu, tingkat produktifitas tenaga kerja yang rendah bisa di sebabkan oleh tidak adanya atau kurangnya

¹¹ Harry Heriawan Saleh, *Persaingan Tenaga Kerja Dalam Era Globalisasi Antara Perdagangan Dan Migrasi*, 68.

input komplementer seperti modal fisik atau manajemen sumber daya manusia yang baik.¹²

Selanjutnya, tingkat upah minimum dalam sebuah masyarakat islam di tentukan dengan memerhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Seorang pekerja haruslah di bayar dengan cukup sehingga dapat membayar makan, pakaian, dan perumahan, untuknya dan untuk keluarganya. Pendidikan anak-anak nya pun harus pula di penuhi, dan demikian pula layanan kesehatan untuknya dan keluarganya.¹³

Di sisi lain, pembangunan merupakan proses yang dapat di telisik dengan menggabungkan dua dimensi kehidupan. Dimensi pembangunan berjumlah dua bab tersusun atas manusia dan alam. Pendidikan dan kesehatan merupakan sepasang isu sentral pembangunan. Pendidikan adalah representasi pembangunan manusia yang condong ke pranata internal. Di sisi

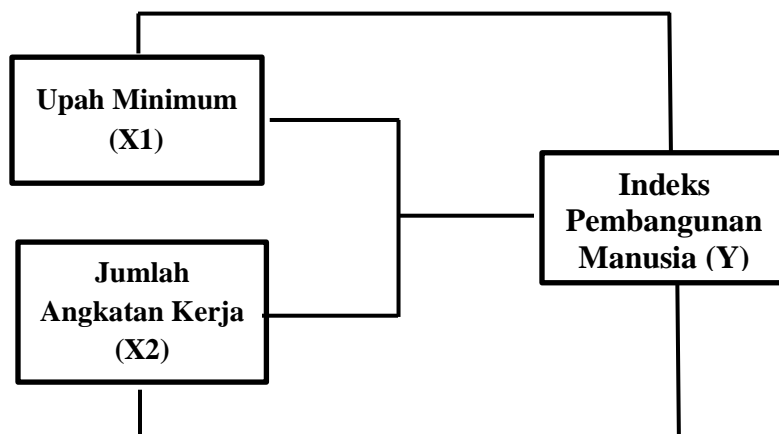
¹² Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 8.

¹³ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 199.

lain, kesehatan beda dari pendidikan. Kesehatan lebih mewakili pembangunan pada pranata internal sekaligus eksternal karena berisikan keterkaitan langsung antara manusia dan alam melalui pendekatan mekanisme *individual hygiene* dan *communal sanitation* yang tergabung dalam satu kesatuan interaksi pada kehidupan sehari-hari.

Dari uraian di atas kerangka pemikiran dapat di gambarkan seperti berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: pedoman penulisan karya ilmiah

Gambar di atas dapat di jelaskan bahwa penulis akan melakukan penelitian tentang pengaruh upah minimum dan

jumlah angkatan kerja terhadap indeks pembangunan manusia, dengan alasan penulis memilih variabel tersebut karena merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada penulisan karya ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” terdiri dari:

BAB Pertama adalah Pendahuluan, Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

BAB Kedua adalah Kajian teoritis, memaparkan secara singkat Tentang Teori Upah Minimum, Pengertian Upah Minimum, Upah Menurut Islam, Teori Jumlah Angkatan Kerja,

Pengertian Angkatan Kerja, Kondisi Ketenagakerjaan, Kelompok Angkatan Kerja, Bukan Kelompok Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Pengertian Indeks Pembangunan Manusia, Parameter Indeks Pembangunan Manusia, Paradigma Pembangunan Manusia, Masalah Sumber Daya Manusia, Penelitian Terdahulu dan Hipotesis Penelitian.

BAB *Ketiga* adalah Metode penelitian, bagian ini membahas tentang tempat dan waktu penelitian, Metode Penelitian, Populasi dan Sampel, Instrumen Penelitian, Teknik Analisis Data, Pengujian Hipotesis dan Operasional Variabel.

BAB *Keempat* adalah Deskripsi dan hasil penelitian, terdiri dari Deskripsi Data, Uji Persyaratan Analisis, Pengujian Hipotesis Pembahasan Hasil Penelitian dan Perspektif Ekonomi Islam.

BAB *Kelima* adalah Kesimpulan dan saran, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.